

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi mengenai penutup dalam kepenulisan penelitian. Di dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai collaborative governance sebagai langkah mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Pada bab ini juga akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu kesimpulan serta saran rekomendasi dari peneliti.

4.1 Kesimpulan

Collaborative Governance merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan, akan memperoleh hasil yang maksimal ketika terdapat kerjasama antar aktor didalamnya. Terkait dengan collaborative governance sebagai langkah mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara belum tercapai dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masing-masing aktor hanya saling melakukan peranannya masing-masing tidak terikat serta tidak memiliki hubungan yang erat didalamnya. Hubungan yang dimiliki antar aktor hanya sebatas partnership atau kerjasama biasa tidak mencapai tahap *Collaborative Governance*.

Menilik dalam 8 kriteria Goldsmith dan Donald hanya tercapai beberapa kriteria dan belum tercapai sepenuhnya. Hal tersebut membuktikan jika *Collaborative Governance* belum tercapai dengan baik dan kerjasama antara Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jepara, HIMKI dan masyarakat masih bersifat partnership tiga aktor.

Hubungan antar aktor dalam pelaksanaan kerjasama antar stakeholder antara pemerintah dan HIMKI memiliki hubungan yang erat, meskipun antar HIMKI dan masyarakat masih belum memiliki hubungan yang erat, namun keberadaan dari HIMKI sangat membantu masyarakat. Pelaksanaan kerjasama yang dijalankan dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir di Kabupaten Jepara terbilang cukup baik meskipun dalam hal ini terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Tidak hanya itu, antar aktor dalam proses kerjasama juga memiliki hubungan yang baik dalam menjalankan perannya. Namun dalam pelaksanaan kerjasama tersebut masih dikatakan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pihak masih tumpang tindih dalam menjalankan perannya.

Meskipun pada pelaksanaannya terdapat kerjasama antar aktor, namun keberadaan dari pihak swasta HIMKI yang merupakan sebuah asosiasi ini masih kurang diketahui oleh masyarakat luas. Mereka yang mengetahui HIMKI hanya masyarakat pemilik industri besar, namun HIMKI memiliki peranan yang cukup besar bagi masyarakat dalam perkembangan industri mebel ukir.

Terkait dengan tantangan yang dialami ketiga aktor tersebut dalam mempertahankan eksistensi ini, perlu adanya kerjasama yang kuat dalam keberjalanan industri mebel ukir. Tantangan seperti kurangnya bahan baku kayu menyebabkan meningkatnya harga bahan baku dan harga pendukung dalam proses produksi ukir, tidak hanya itu tenaga kerja yang semakin berkurang tentunya perlu peran yang besar dari pemerintah. Dan tantangan yang terakhir yaitu menurunnya ekspor dan meningkatnya harga container dalam

pendistribusian produk ukir tentu juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemilik industri mebel ukir di Kabupaten Jepara.

4.2 Saran

Terkait dalam pelaksanaan *collaborative governance* serta menghadapi tantangan tentunya dibutuhkan peran dari masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan *collaborative governance* sendiri diperlukan sifat dari ketiga aktor yang memiliki komunikasi yang baik serta tidak adanya dominasi. Hal tersebut dimaksudkan agar proses dari kolaborasi tersebut bisa mencapai titik keberhasilan. Tidak hanya diperlukan perbaikan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan HIMKI agar dalam pelaksanaan proses kolaborasi memiliki hubungan erat dan saling membantu.

Meskipun dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir belum tercipta sebuah *Collaborative governance* yang terbukti dari beberapa kriteria keberhasilan Collaborative tidak tercapai, namun diharapkan antar aktor saling bekerjasama dengan baik dalam menjalankan peranannya. Sehingga dapat diperoleh hasil kerjasama yang mampu menjaga eksistensi industri mebel ukir di Kabupaten Jepara.

Terkait dengan tantangan yang ada dalam menjaga eksistensi industri mebel ukir tentunya diperlukan beberapa langkah :

- 1). Terkait dengan tenaga kerja, masing-masing stakeholder perlu untuk merangsang regenerasi pengukir, sehingga tenaga kerja dalam pengukir tidak berkurang. Tidak hanya itu bagi pemerintah juga perlu mengubah sistem dalam uji sertifikasi pengukir. Dimana standar lsp masih pada level

rendah. Perlu adanya pembedaan level, hal tersebut agar saat pekerja sudah terjun dalam industri mebel ukir, perusahaan mebel ukir bisa memberikan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pekerja level rendah dengan yang tinggi.

- 2). Terkait dengan bahan baku, pemerintah dan HIMKI perlu untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, mislakan dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan Kabupaten Jepara serta dengan daerah-daerah lain. Agar pasokan dari bahan baku bisa tersedia dengan baik dengan harga yang bisa ditekan sehingga masyarakat pemilik industri mebel ukir tidak merasa kesulitan dalam hal terakit bahan baku tersebut.
- 3). Terkait dengan menurunnya ekspor, di era pandemi ini tentunya permasalahan mengenai ekspor merupakan permasalahan yang dialami hampir seluruh negara di dunia, namun terkait dengan permasalahan ekspor sendiri, setelah adanya new normal, pihak pemerintah dan HIMKI bisa memperkuat kerjasama dan kembali menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri yang dulu pernah bekerjasama. Penguatan kerjasama tersebut dibarengi dengan meningkatkan kepercayaan bagi mereka. Sehingga terdapat hubungan yang baik antara pihak satu dengan yang lain. Dan kembali mendapat kepercayaan untuk melakukan kegiatan ekspor kembali.